

## Pemilu dan Pilkada Wajib Menciptakan Kota Layak Huni

### HIGHLIGHTS

Pemerintah baru dan pemerintah daerah hasil Pilkada wajib membalik arah pembangunan. Kota-kota yang diabaikan harus diubah. Kota layak huni harus menjadi prioritas. Untuk merubah air bersih menjadi air minum, mengurangi polusi udara dan menyediakan ruang terbuka hijau.

Jika tidak, kehidupan warga kota seperti di Jakarta kian “rungskad” ditekan minimnya akses air minum aman yang baru mencakup 17,8 persen penduduk, RTH yang baru sekitar 9,94 persen dari total luas wilayah. Belum lagi ketiadaan akses pada hunian layak bagi 1,77 juta warga. Sanitasi yang baru mencapai 92,79 persen. Di sisi lain warga kota Jakarta dikepung 10 PLTU di sekitar Jakarta yang membuang emisi zat partikulat 3-7, menurut Greenpeace Indonesia, 5 kali lebih banyak dibanding pembangkit batubara di Tiongkok.

Bisakah pemerintah baru melakukan perubahan radikal dan menjamin Kota Layak Huni dalam waktu 5 tahun ke depan untuk memperbaiki kelayakan hidup warga terutama di kota-kota Indonesia?

Untuk pertanyaan, komentar, dan saran, silakan hubungi staf redaksi RPK:

+62-81367804001 (Laras) atau office@rpk-indonesia.org / Edisi sebelumnya Jurnal RPK dapat diakses di <https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/jurnal-rpk.html>

Alamat Kantor RPK:  
Jalan Taman Patra III No.8B, Kompleks Patra Land, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Whatsapp: +62-81367804001 (Tiara)

**1. KUALITAS UDARA BURUK**

World Air Quality Report menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara pada 2023. Satu tingkat di atas Vietnam yang menempati posisi kedua. Tingkat PM 2.5 rata-rata Indonesia di angka 37,1 µg/m<sup>3</sup>. Sementara Vietnam di angka 29,6 µg/m<sup>3</sup> setara dengan Laos yang menempati posisi ketiga.

Sedikitnya lima kota besar di Indonesia masuk dalam daftar 15 kota dengan polusi udara terburuk se-Asia Tenggara. Tangerang Selatan menempati posisi pertama dengan tingkat polutan 71,7 µg/m<sup>3</sup>. Disusul Tangerang di posisi ketiga dengan tingkat polutan 54,1 µg/m<sup>3</sup>. Lalu ada Bekasi di angka 49,9 µg/m<sup>3</sup>. Jakarta dengan angka 43,8 µg/m<sup>3</sup> dan Bandung 39,6 µg/m<sup>3</sup>.

Kota	Tingkat PM2.5 Rata-Rata	Sumber Polusi Utama	Kualitas Udara	Catatan Khusus
Jakarta	50-100 µg/m <sup>3</sup>	Kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah	Buruk	Sering melebihi batas aman WHO
Surabaya	50-70 µg/m <sup>3</sup>	Industri, transportasi	Cukup Buruk	Terkonsentrasi di area industri dan pelabuhan
Sydney	10-20 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, pembakaran kayu rumah tangga, kebakaran hutan	Baik	Kualitas udara menurun selama kebakaran hutan
Tokyo	10-20 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, industri	Baik	Kualitas udara baik dengan regulasi ketat
Seoul	30-50 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, industri, polusi lintas batas (Tiongkok)	Sedang	Polusi meningkat pada musim tertentu
Kuala Lumpur	30-50 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, industri, kabut asap lintas batas	Sedang	Kualitas udara memburuk selama musim kabut asap
New York	15-30 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, pemanasan bangunan, industri	Sedang	Polusi meningkat saat cuaca ekstrem atau aktivitas industri tinggi
London	20-30 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi (kendaraan diesel), pemanasan bangunan	Sedang	Kualitas udara terpengaruh oleh lalu lintas tinggi, terutama di pusat kota
Paris	20-35 µg/m <sup>3</sup>	Transportasi, pemanasan, industri	Sedang	Kualitas udara menurun selama cuaca dingin dan padatnya lalu lintas

Tabel Perbandingan Polusi Udara



📷 Warga membagi-bagi air ke wadah penampung air milik warga RW 011, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023). | KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Sebaliknya, udara terbersih di Indonesia ada di kota Mamuju dengan tingkat polutan  $3,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Nomor dua ada Kupang dengan tingkat PM 2.5 di angka  $4,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Kendari di posisi ketujuh dengan  $8,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Banda Aceh dan Balikpapan berada di nomor urut 13 dan 14 dengan tingkat polutan  $9,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## 2. CAKUPAN AIR MINUM LAYAK MASIH KECIL

Menurut studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan Kelompok Kerja

**Di perkotaan, akses air minum aman baru menyentuh angka 15,1 persen. Sementara di pedesaan capaiannya baru sekitar 8,3%.**

Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS), akses air minum aman di Indonesia pada 2020 baru mencapai 11,9 persen. Sisanya, 88,1 persen masih terkontaminasi bakteri E Coli serta mengandung TDS, pH, Nitra, dan Nitrit. Akses air minum yang mengandung unsur-unsur itu masuk kategori tidak aman.

Di perkotaan, akses air minum aman baru menyentuh angka 15,1 persen. Sementara di pedesaan capaiannya baru sekitar 8,3%.

## DATA & ANGKA

Di Jakarta, akses sanitasi pada 2022 baru mencapai 92,79 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,17 persen.

.....

Di Jakarta dari 2,78 juta warga baru ada sekitar 1 juta rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses ke hunian layak. Sementara sisanya 1,77 juta belum memiliki akses.

.....

Di Jakarta, akses air minum aman baru mencakup 17,8 persen penduduk. Akses air minum perpipaan mencapai 37,64 persen meski belum tentu aman. Lalu akses air minum layak mencapai 99,84 persen.

Di sisi lain, capaian akses air minum layak di Indonesia kini sudah menyentuh 93 persen dan hanya 7 persen yang dinyatakan tidak layak. Di pedesaan, akses air minum layak berada di angka 87,1 persen. Sedangkan di perkotaan mencapai angka 97,6 persen.

Khusus di Jakarta, akses air minum aman baru mencakup 17,8 persen penduduk. Akses air minum perpipaan mencapai 37,64 persen meski belum tentu aman. Lalu akses air minum layak mencapai 99,84 persen.

Perlu dicatat, akses air minum aman berbeda dengan akses air minum layak. Layak belum tentu aman. Aman sudah pasti layak.

### 3. AKSES SANITASI TERBATAS

Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Maret 2023, cakupan sanitasi Indonesia baru mencapai 73,9 persen. Sianya, 26,1 persen masih mengalami masalah sanitasi.

Sementara di Jakarta, akses sanitasi pada 2022 baru mencapai 92,79 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,17 persen.

Buruknya sanitasi di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya penyakit pada balita. Termasuk stunting, diare, hingga kematian anak.

### 4. MINIM RUANG TERBUKA HIJAU

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

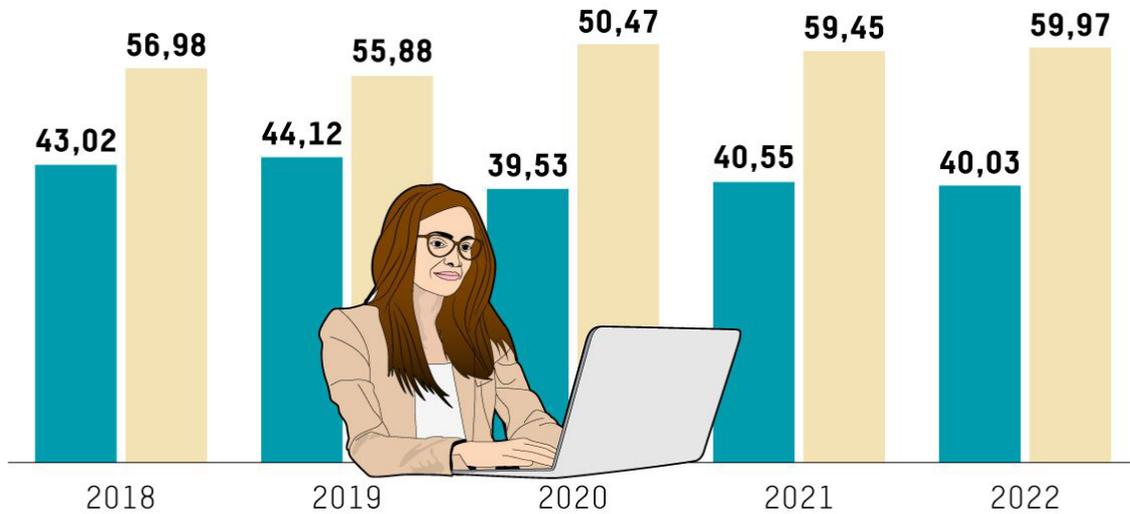
Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Ketersediaan dan Kualitas Taman	Catatan Khusus
Jakarta	10-15%	Keterbatasan ruang terbuka hijau, dengan beberapa taman utama seperti Monas, Taman Suropati, dan Taman Mini.	Keterbatasan lahan dan urbanisasi cepat membatasi pengembangan RTH.
Surabaya	20-25%	Memiliki beberapa taman besar seperti Taman Bungkul, dengan program pemerintah untuk memperluas RTH.	Surabaya dikenal sebagai kota dengan komitmen memperluas RTH.
Sydney	46%	Banyak taman dan ruang hijau yang luas seperti Royal Botanic Garden dan Hyde Park.	Sydney memiliki kebijakan kuat untuk mempertahankan dan memperluas RTH.
Tokyo	20%	Ruang terbuka hijau tersebar di seluruh kota, termasuk taman besar seperti Ueno Park dan Shinjuku Gyoen.	Meskipun kota padat, Tokyo tetap menyediakan banyak taman besar.
Seoul	27%	Banyak taman modern dan ruang hijau seperti Seoul Forest dan Namsan Park.	Seoul aktif mengembangkan ruang hijau, termasuk revitalisasi sungai Cheonggyecheon.
Manila	5-10%	Keterbatasan ruang hijau dengan beberapa taman besar seperti Rizal Park.	Urbanisasi cepat dan kepadatan penduduk tinggi mengurangi ruang terbuka hijau.
London	33%	London memiliki banyak taman besar seperti Hyde Park, Regent's Park, dan Hampstead Heath.	London dikenal sebagai salah satu kota dengan banyak ruang hijau.
New York	27%	Central Park, Prospect Park, dan banyak ruang hijau lain tersebar di seluruh kota.	Central Park merupakan salah satu ruang hijau paling terkenal di dunia.
Paris	14%	Banyak taman kecil hingga menengah seperti Jardin du Luxembourg dan Parc des Buttes-Chaumont.	Paris memiliki banyak ruang hijau, tetapi persentase RTH relatif rendah.

Tabel Perbandingan Ruang Terbuka Hijau

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ruang terbuka hijau (RTH) di berbagai kota-kota besar di Indonesia pada 2023 masih di bawah 15 persen. Di Jakarta, misalnya, luas RTH hanya sekitar 9,94 persen dari total luas wilayah. Lalu di Bandung, hanya 12,25

persen dan Tangerang Selatan hanya 7,3 persen.

Minimnya ruang terbuka hijau ini menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di beberapa kota, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan. Kualitas



Keterangan:  
 2018-2021: menurut Sakernas bulan Agustus  
 2022: data bulan Februari

udara yang buruk dan minimnya RTH disebut dapat mempersingkat usia selama dua tahun.

## 5. KURANG HUNIAN LAYAK

Akses warga terhadap hunian layak di berbagai kota juga masih belum cukup. Di Jakarta, misalnya, selama 2020-2022 peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak masih terbilang rendah.

Badan Pusat Statistik mencatat pada 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak hanya sebanyak 33,18

**Pada Agustus 2021 total pekerja formal di DKI Jakarta tercatat 2,92 juta orang dan informal 1,812 juta orang. Adapun pada Agustus 2022 BPS Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, pekerja formal bertambah 5,22 persen menjadi 3,07 juta orang, sedangkan jumlah pekerja informal turun 0,82 persen menjadi 1,79 juta orang.**

persen. Tahun berikutnya jumlahnya menjadi 40 persen. Tetapi pada 2022 jumlahnya menurun jadi 36,23 persen.

Jika merujuk data BPS, total rumah tangga di Jakarta pada 2022 mencapai 2,78 juta. Artinya, baru ada sekitar 1 juta rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses ke hunian layak. Sementara sisanya 1,77 juta belum memiliki akses.

## 6. LAPANGAN KERJA SEMPIT

Lapangan kerja di kota-kota besar juga

Provinsi/Kota	APBD 2024 (Rp Triliun)	Jumlah Penduduk (Juta)	Tingkat Pengangguran 2024 (%)
DKJ-Jakarta	81.78	10.56	6.0
Jawa Timur	36.20	41.07	4.8
Jawa Barat	44.26	49.93	5.5
Jawa Tengah	34.17	36.52	4.9
Surabaya	12.30	2.87	5.2
Bandung	7.30	2.44	5.0
Semarang	6.10	1.65	5.1
Makasar	5.70	1.52	5.3
Medan	6.90	2.43	6.2
Denpasar	4.30	0.94	4.7
Balikpapan	3.50	0.71	5.0

☐ Table Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 dan Total Pengangguran Terbuka

semakin lama semakin berkurang. Data BPS menunjukkan dalam lima tahun terakhir (2019-2024), lapangan kerja formal hanya menyentuh angka 2 juta. Merosot jauh dibandingkan pada 2009-2014 yang mencapai 15,6 juta lapangan kerja formal.

Dalam kata lain, kesempatan kerja bagi generasi baru, yakni Gen Z semakin berkurang. Banyak Gen Z yang mengaku kesulitan mendapat kerja meski mereka berada di kota metropolitan seperti Jakarta.

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia hanya bekerja di sektor informal. Mereka menjadi pengemudi ojek ataupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sementara salah satu indikator kota layak huni adalah kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar dari mereka yang bekerja di sektor informal memiliki penghasilan rendah atau kurang sejahtera.

Lapangan kerja di kota-kota besar juga semakin lama semakin berkurang. Data BPS menunjukkan dalam lima tahun terakhir (2019-2024), lapangan kerja formal hanya menyentuh angka 2 juta. Merosot jauh dibandingkan pada 2009-2014 yang mencapai 15,6 juta lapangan kerja formal.



# Butuh Komitmen Pemerintah Wujudkan Kota Layak Huni



 Ruang terbuka hijau di sela-sela perumahan dan pekantoran di kawasan Menteng, Jakarta (19/9/2019). Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Jakarta menargetkan total luas ruang terbuka hijau mencapai 30 persen dari luas wilayah DKI pada 2030. | KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

## 1. WUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU 30 %

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar menyoroti buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Ia meminta agar pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah konkret membenahi kualitas udara di kota-kota ini. Palsalnya, kata Gus Muhaimin, buruknya kualitas

udara di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Salah satu indikatornya adalah banyaknya anak-anak Indonesia yang kini terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sejumlah cara bisa dilakukan pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kualitas udara. Salah satunya dengan mewujudkan amanah Undang-Undang

Kota	Tingkat PM2.5 Rata-Rata	Sumber Polusi Utama	Kualitas Udara	Catatan Khusus
Jakarta	50-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah	Buruk	Sering melebihi batas aman WHO
Surabaya	50-70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Industri, transportasi	Cukup Buruk	Terkonsentrasi di area industri dan pelabuhan
Sydney	10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, pembakaran kayu rumah tangga, kebakaran hutan	Baik	Kualitas udara menurun selama kebakaran hutan
Tokyo	10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, industri	Baik	Kualitas udara baik dengan regulasi ketat
Seoul	30-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, industri, polusi lintas batas (Tiongkok)	Sedang	Polusi meningkat pada musim tertentu
Kuala Lumpur	30-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, industri, kabut asap lintas batas	Sedang	Kualitas udara memburuk selama musim kabut asap
New York	15-30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, pemanasan bangunan, industri	Sedang	Polusi meningkat saat cuaca ekstrem atau aktivitas industri tinggi
London	20-30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi (kendaraan diesel), pemanasan bangunan	Sedang	Kualitas udara terpengaruh oleh lalu lintas tinggi, terutama di pusat kota
Paris	20-35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Transportasi, pemanasan, industri	Sedang	Kualitas udara menurun selama cuaca dingin dan padatnya lalu lintas

Tabel Perbandingan Polusi Udara

terkait RTH. Seperti di Jakarta yang mendapat amanah untuk paling tidak punya 30 persen RTH dari total luas wilayahnya.

Selanjutnya, sambung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah juga perlu mewujudkan komitmennya dalam menekan laju deforestasi dengan menanam kembali hutan-hutan yang



**Pemerintah juga perlu mewujudkan komitmennya dalam menekan laju deforestasi dengan menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Penggunaan energi terbarukan juga perlu digencarkan supaya kadar emisi karbon dan polutan di udara lekas berkurang.**

sudah gundul. Cara ini dianggap ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menyerap polusi yang ada di kota-kota besar.

Penggunaan energi terbarukan juga perlu digencarkan supaya kadar emisi karbon dan polutan di udara lekas berkurang. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan baku batu bara

Kota	Persentase Akses Toilet/Jamban Layak	Catatan
Jakarta	80-90%	Sebagian besar penduduk memiliki akses ke toilet/jamban yang layak, namun beberapa wilayah padat penduduk masih menghadapi tantangan.
Surabaya	80-90%	Situasi serupa dengan Jakarta, dengan akses yang cukup baik, tetapi masalah masih ada di wilayah-wilayah tertentu.
Sydney	100%	Hampir seluruh penduduk memiliki akses ke toilet yang bersih dan layak di semua area.
Tokyo	100%	Akses yang sangat baik, dengan toilet publik modern dan bersih tersedia secara luas.
Seoul	100%	Akses yang sangat tinggi ke fasilitas toilet bersih dan modern, baik di rumah maupun di tempat umum.
Manila	70-80%	Akses terhadap toilet layak lebih terbatas, terutama di daerah kumuh dan pemukiman padat.
London	100%	Hampir seluruh penduduk memiliki akses ke toilet yang bersih dan layak, termasuk fasilitas publik yang memadai.
New York	100%	Akses yang sangat baik, dengan toilet bersih dan layak tersedia di seluruh kota, termasuk fasilitas umum.
Paris	100%	Akses ke toilet layak sangat baik, dengan banyak fasilitas publik yang bersih dan terawat dengan baik.

TABEL PERBANDINGAN AKSES KEPADA TOLIET/JAMBAN

pun perlu dievaluasi.

“Gedung-gedung dan perusahaan swasta ikut serta melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan mereka. Kalau perlu siapkan sanksinya, bisa pembertan pajak atau pungutan lainnya,” jelas Gus Muhaimin.

## 2. PERLU ATASI KEKURANGAN HUNIAN

Director and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu, Wicaksono Sarosa mengatakan pengkonsolidasian lahan perlu dilakukan di kota-kota besar. Hasil dari lahan yang terkonsolidasi

ini dapat dibangun hunian-hunian vertikal dengan harga terjangkau. Hunian-hunian tersebut harus diatur langsung pemerintah dan tidak mengikuti mekanisme pasar agar harganya dapat dijangkau masyarakat kecil.

Lokasinya juga perlu diperhatikan. Paling tidak, mesti dekat dengan perkantoran.

Dengan demikian, menurut Wicaksono, mobilisasi kendaraan pribadi menjadi minim. Masyarakat lebih senang berjalan kaki untuk mencapai tempat kerja. Dampak terusnya, tentu saja mengurangi polusi udara.

Dari pembangunan hunian-hunian vertikal ini juga nantinya bakal tersedia lahan-lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH. Ini, kata Wicaksono, cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurai masalah perkotaan, termasuk polusi udara dan minimnya ketersediaan hunian yang terjangkau.

“Bisa juga, dulu pernah ada usulan, membangun hunian di atas pasar. Ada contohnya di Pasar Rumput walaupun saya nggak tahu penghunian-nya belum selesai-selesai persoalannya. Namun, ide seperti itu bisa dikembangkan terus,” tutur Wicaksono.

### 3. KRISIS SANITASI

Terkait persoalan sanitasi, Wicaksono mengungkapkan, upaya yang bisa dilakukan—selain memperluas akses ke masyarakat pedesaan dan sebagian kecil daerah-daerah kumuh di kota besar—adalah dengan membangun sewerage system yang pengelolaannya diurus pemerintah daerah. Sebab, selama ini, masih banyak rumah di Indonesia yang menggunakan septic tank individual.

Dampak dari septic tank individual ini menyebabkan air tanah terus diracuni oleh limbah domestik. Sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan kebutuhan airnya dari sumur atau air tanah.



.....

Dapat dibangun hunian-hunian vertikal dengan harga terjangkau. Hunian-hunian tersebut harus diatur langsung pemerintah dan tidak mengikuti mekanisme pasar agar harganya dapat dijangkau masyarakat kecil.

Wicaksono Sarosa,  
Director and Chief  
Knowledge Worker  
Ruang Waktu.

Kota	Kebutuhan (Hektar)*	Luas RTH Eksisting (Hektar)	Persentase RTH Eksisting dari Kebutuhan
Jakarta Pusat	1.444	320,7	22,2%
Jakarta Barat	3.778	269,5	7,1%
Jakarta Timur	5.641	635,7	11,3%
Jakarta Selatan	4.238	699,1	16,5%
Jakarta Utara	4.400	447,6	10,2%

\*Sesuai standar minimal RTH 30 persen dari luas wilayah kota

### Target Penyediaan Ruang Hijau DKI Jakarta

Kebijakan	Target Luas RTH
Rencana Induk Djakarta 1965-1985	37,2%
RUTR Jakarta 1985-2005	25,85%
RTRW DKI Jakarta 2010	13,94%
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ	11,5%
RTRW DKI Jakarta 2030	30%

#### Kebutuhan dan Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta

“Kalau tidak bisa skalanya kota karena terlalu besar, mungkin bisa juga dibangun septic tank dan sewerage system yang komunal,” jelas Wicaksono.

#### 4. KETERSEDIAAN AIR MINUM TERBATAS

Sementara soal ketersediaan air minum aman dan layak, Wicaksono menuturkan, hal ini tidak akan terwujud jika pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak ketat. Kebocoran-kebocoran anggaran di PDAM harus diredam untuk memastikan rencana memberikan air minum aman dan layak kepada masyarakat dapat terwujud.

Idealnya, menurut Wicaksono, air minum aman dan layak memang disediakan langsung pemerintah melalui pipa-pipa milik PDAM. Itu pula yang dilakukan negara-negara maju di mana air dari keran pun langsung dapat diminum.

Meski begitu, Wicaksono mengatakan, kebutuhan terkait air minum ini perlu dihitung ulang. Sebab, air minum adalah standar paling tinggi dan tidak semua kebutuhan air untuk diminum.

“Misalnya untuk mandi kan tidak perlu air minum. Terus untuk mencuci kan juga tidak perlu air minum,” pungkas Wicaksono.

#### 5. SISTEM PERUMAHAN SOSIAL



Ahli tata kota Marco Kusumawijaya mengatakan pemerintah perlu menciptakan dan mengelola cadangan perumahan sosial untuk mengatasi terbatasnya hunian layak bagi masyarakat. Cadangan ini bukan saja harus diciptakan tetapi juga harus dikelola secara sistematis dan dilindungi dari spekulasi pasar komersial.

Maksudnya, kata Marco, perumahan subsidi tidak boleh serta merta dijual di pasar bebas. Perlu dibentuk lembaga yang khusus mengelola hal tersebut.

Sistem perumahan sosial perlu dibentuk secara komprehensif. Bukan saja membangun banyak hunian terjangkau tetapi juga menciptakan cadangan permanen yang secara progresif semakin besar.

“Tujuannya dua, agar orang-orang yang tidak mampu membeli rumah dengan harga pasar bisa memiliki rumah. Lalu bisa menyaingi atau paling tidak meredam kenaikan harga rumah di pasar bebas,” tutur Marco.

## 6. PERLU CITY DEVELOPMENT RELATED INDUSTRY.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN),

**Pemerintah perlu menciptakan dan mengelola cadangan perumahan sosial untuk mengatasi terbatasnya hunian layak bagi masyarakat. Cadangan ini bukan saja harus diciptakan tetapi juga harus dikelola secara sistematis dan dilindungi dari spekulasi pasar komersial.**

.....

Marco Kusumawijaya, Ahli Tata Kota



Amin Subekti mengatakan ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk membuka jutaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, secara jangka pendek, pemerintah bisa memanfaatkan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor UMKM.

Artinya, pemerintah perlu membelanjakan kebutuhan setengah kebutuhan operasionalnya melalui UMKM. Ini, menurut Amin, selain bakal meningkatkan omzet UMKM, juga bakal membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Dalam jangka menengah perlu dibangun city development related industry. Pembangunan dan pembangunan kota yang saling berkesinambungan dengan sektor industri.

Industri-industri ini juga nantinya bakal didorong untuk banyak menggunakan produk UMKM. Dengan demikian, permintaan terhadap UMKM juga akan tumbuh dan lagi-lagi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.

Sedangkan secara jangka panjangnya, penting untuk dibangun industri-industri masa depan. Misal saja, industri yang terkait dengan transisi energi, kemudian knowledge based industry,



**Saya berharap Jakarta bisa mewujudkan kota layak huni yang mencerminkan modernitas sekaligus warisan budaya yang kaya.**

.....  
**Ahmad Moetaba,  
anggota DPRD  
DKI Jakarta  
2024-2029**

dan creative industry.

“Jadi, dengan beberapa hal tersebut maka diharapkan turunannya itu ada dua. Dari sisi bisnisnya berkembang, otomatis tenaga kerja yang diciptakan dari tiga program itu juga akan tumbuh,” pungkas Amin.

Ahmad Moetaba, anggota DPRD DKI Jakarta yang baru terpilih untuk periode 2024-2029, menekankan pentingnya pemetaan aset milik Pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan lapangan kerja bagi Gen-Z melalui kewirausahaan perkotaan. Ia menganjurkan revitalisasi dan dukungan dana bagi kelompok industri kreatif dengan ide bisnis yang menguntungkan.

Menurut kader Partai Kebangkitan Bangsa ini, penilaian ulang standar layanan publik Jakarta bertujuan untuk mewujudkan kota yang mencerminkan modernitas sekaligus warisan budaya yang kaya.

“Saya berharap Jakarta ke depan bisa membangun dirinya lebih maju dan selaras dengan semangat kebersamaan dan keragaman,” ujarnya. Ia meyakini bahwa pengembangan seni dan budaya sangat penting, karena dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kolaboratif dan kreatif di kota tersebut. Pada akhirnya, pertumbuhan budaya ini akan meningkatkan layanan publik dan menghasilkan hasil pembangunan yang lebih berempati dan adil bagi seluruh warga Jakarta.





Perpustakaan Daerah DKI Jakarta

# Air Minum syarat Menjadi Negara Maju

ANALISIS TIM REDAKSI RUMAH POLITIK KESEJAHTERAAN  
(RPK) | Ngarto Februana (Peneliti RPK)

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November nanti, sudah seharusnya para calon bupati, wali kota, dan gubernur menyuarkan program penyediaan “air keran siap minum” gratis setara air mineral kemasan. Kota-kota besar di Indonesia sudah seharusnya menyediakan layanan tersebut. Apalagi jika pemerintahan baru nanti menjalankan program makan siang gratis bagi siswa, di sekolah perlu disediakan air keran siap minum.

Di beberapa kota sudah tersedia fasilitas ini namun jumlahnya sangat sedikit, kecuali Kota Malang dengan 160 titik yang tersebar di ruang publik dan Surabaya 30 titik. Kota lain seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, tersedia kurang dari 10 titik. Di Ibu Kota

Negara Nusantara (IKN), pemerintah menyiapkan fasilitas keran air minum.

## Dampak bagi Kesejahteraan

Program “air keran layak minum” sudah seharusnya menjadi prioritas jika Indonesia ingin melakukan lompatan menjadi negara maju. Dampak inisiatif ini akan cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut sebuah kajian yang meneliti bagaimana Bialla, kota kecil terpencil di Papua Nugini, berpenduduk 13 ribu jiwa, dapat berkembang setelah memperoleh akses ke air keran bersih yang mengalir . Studi tersebut menemukan bahwa menyediakan akses yang andal ke air minum bersih di depan pintu rumah penduduk bisa menurunkan risiko penularan penyakit melalui air air seperti kolera, diare, disentri,

Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Layak Minum	Catatan
Jakarta	60-70%	Sebagian besar penduduk memiliki akses, tetapi air keran tidak selalu aman diminum langsung tanpa penyaringan.
Surabaya	60-70%	Situasi serupa dengan Jakarta, dengan sebagian besar penduduk memiliki akses air yang terhubung ke jaringan publik.
Sydney	100%	Hampir semua penduduk memiliki akses ke air keran yang aman diminum langsung.
Tokyo	100%	Air keran yang aman diminum tersedia di seluruh kota dengan kualitas sangat tinggi.
Seoul	100%	Seluruh penduduk memiliki akses ke air minum yang aman dan berkualitas tinggi.
Manila	50-60%	Akses air minum yang layak terbatas, dengan banyak penduduk mengandalkan air galon atau sumber air lainnya.
London	100%	Air keran aman diminum dan tersedia di seluruh kota.
New York	100%	Air keran aman diminum tersedia di seluruh kota, dianggap salah satu yang terbaik di dunia.
Paris	100%	Akses air minum yang layak sangat luas, dengan kualitas air yang sangat baik.

Table Layanan Cakupan dan Kualitas Air Minum

hepatitis A, dan tifus. Layanan tersebut juga meningkatkan angka kehadiran sekolah di kota tersebut. Anak-anak yang mendapat akses ke sumber air yang lebih baik dapat menghasilkan kesehatan yang lebih baik, dan dengan demikian kehadiran di sekolah menjadi lebih baik.

Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan program

penyediaan air minum di kota-kota besar telah secara signifikan mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan diare, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana air minum yang tidak aman menyebabkan sekitar satu juta kematian terkait diare setiap tahunnya. Akses air yang lebih baik meringankan beban ekonomi



dan sosial, menghemat waktu dan energi untuk pengambilan air. Hal ini akan meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya medis, dan meningkatkan kehadiran di sekolah.

Program-program ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang, khususnya masyarakat kurang mampu. Keberlanjutan dan ketahanan sangat penting, yang membutuhkan perlindungan dan diversifikasi sumber air untuk memastikan kelangsungan

jangka panjang di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Layanan air keran layak minum juga bisa menurunkan konsumsi air minum kemasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat konsumsi air galon di Indonesia termasuk tinggi, dengan DKI Jakarta paling tinggi (79,39 persen), disusul Kalimantan Timur 79,19 persen. Sementara itu, harga air kemasan di Indonesia cukup tinggi, untuk 1,5 liter antara Rp 5.500 hingga 25.000 sedangkan di Mesir hanya US\$ 0,14 atau Rp 2.168.



Ekonom senior Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia antara lain akibat kebiasaan sehari-hari mengonsumsi air galon. Menurut Bambang, tingkat konsumsi air galon secara tidak sadar menggerus penghasilan kelas menengah.

Air keran hemat biaya dan ramah lingkungan, mengurangi limbah plastik dan konsumsi energi yang terkait dengan produksi air minum kemasan. Kandungan mineralnya seringkali lebih

unggul, karena proses pengolahan mempertahankan nutrisi penting, sedangkan air minum kemasan dapat kehilangannya. Jika disaring dengan benar, air keran aman untuk diminum, menghilangkan kontaminan secara efektif, dan rasanya sama segarnya dengan air minum kemasan.

Dengan memilih air keran yang aman, seperti yang terlihat di banyak negara maju, masyarakat dapat menghemat biaya air minum kemasan. Jika kota-kota di Indonesia meningkatkan infrastruktur air mereka, penduduk

## REKOMENDASI SOLUSI

1. Mengadopsi teknologi canggih pengelolaan air minum dan air bersih (non-minum) untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kualitas, termasuk teknologi mengolah sumber air marginal seperti air gambut, air payau, dan air tercemar.

.....

2. Memanfaatkan teknologi sistem tata kelola berbasis digital untuk membantu penyediaan air bersih secara masif.

.....

3. Revisi peraturan terkait definisi air minum aman dan rencana pengamanan serta pengawasan air minum oleh Kementerian Kesehatan.

dapat mengakses sumber air yang lebih efisien dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

### Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Indonesia dapat memetik pelajaran berharga dari kota-kota di seluruh dunia yang berhasil menyediakan air keran layak minum. Kota Zermatt mendapatkan air mereka dari lingkungan alam yang dilindungi, yang menjamin kemurniannya. Indonesia dapat Menetapkan Daerah Aliran Sungai yang Dilindungi, yakni melindungi area di sekitar sumber air untuk mencegah polusi dari limpasan pertanian dan pembangunan perkotaan.

Kota-kota dengan air keran berkualitas tinggi, seperti Munich dan Vancouver, telah berinvestasi secara signifikan dalam infrastruktur air mereka. Ini termasuk meningkatkan instalasi pengolahan air untuk memastikan bahwa instalasi tersebut memenuhi standar keselamatan tinggi.

Regulasi yang efektif sangat penting. Misalnya, kota-kota di AS mematuhi Undang-Undang Air Minum yang Aman, yang mewajibkan pengujian dan pelaporan rutin. Indonesia dapat Mengembangkan Standar Kualitas Air yang Komprehensif, antara lain membuat dan menegakkan regulasi yang menetapkan tingkat kontaminan maksimum.

Kota-kota seperti San Francisco memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air yang efisien. Indonesia dapat Mengadopsi Sistem Pengelolaan Air Cerdas: Menggunakan sensor dan analisis data untuk memantau kualitas air secara real-time dan mendeteksi kebocoran dalam sistem. Indonesia juga bisa mendorong penggunaan kembali air limbah yang diolah untuk keperluan non-minum sehingga mengurangi pasokan sumber air bersih.

## REKOMENDASI SOLUSI

Kota-kota yang berhasil dengan air keran layak minum mempraktikkan keberlanjutan. Indonesia dapat Mendorong Pertanian Berkelanjutan untuk mempromosikan praktik yang meminimalkan limpasan bahan kimia ke dalam persediaan air. Berikutnya melaksanakan program yang mendorong pengumpulan air hujan untuk melengkapi persediaan air.

Dengan mengadopsi strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas air kerannya, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke air minum yang aman. Pengalaman kota-kota dengan sistem air yang berhasil memberikan peta jalan untuk mengembangkan solusi efektif yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

### Sumber Pendanaan Air Keran Layak Minum

Pendanaan untuk program air minum yang terjangkau berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan APBD, yang mencakup biaya operasional dan pemeliharaan seperti pengolahan dan distribusi air. Subsidi silang biaya pengguna juga penting; penduduk yang lebih kaya membayar tarif yang lebih rendah daripada air minum kemasan, sementara rumah tangga berpenghasilan rendah dikecualikan. Pendapatan dari tarif ini merupakan sumber pendanaan utama.

Pemerintah dapat memberikan hibah, subsidi, atau bantuan keuangan untuk meningkatkan infrastruktur air minum, terutama untuk kotamadya yang lebih kecil. Perusahaan air dapat menerbitkan obligasi atau mendapatkan pinjaman untuk proyek besar, dan pemerintah daerah dapat bermitra dengan perusahaan swasta melalui Kemitraan Publik-Swasta (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/ KPBU) untuk mengelola sistem, menawarkan pendanaan dan keahlian dengan imbalan bagi hasil pendapatan atau kontrak layanan.

4. Meningkatkan investasi dan alokasi anggaran, baik APBN maupun APBD, untuk pembangunan dan pembaruan infrastruktur air bersih. Anggaran program makan siang gratis juga seharusnya memasukkan komponen air keran layak minum di sekolah.

5. Mengembangkan skema pendanaan inovatif, seperti kerjasama pemerintah-swasta (KPBU), untuk mendukung penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

6. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pengelolaan air untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang optimal.

OPINI

# MENGAPA AIR MINUM DINOMERDUAKAN



OLEH:  
SUGENG BAHAGIJO

Direktur Rumah Politik  
Kesejahteraan RPK

Sebelum memikirkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lebih mendesak memikirkan dan menemukan solusi bagi kota-kota besar Indonesia: Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makasar, Pontianak, Bandung, dan Palembang, dan lain-lain. Kota-kota besar tersebut masih belum layak huni.

Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 membuka peluang politik dan peluang perubahan-perubahan menuju Kota Layak Huni (KLH) agar bisa merintis dan melompat tinggi menjadi negara maju.

Solusi Jakarta dan Surabaya untuk berubah dan diubah menjadi Kota Layak Huni (Livable Cities) seharusnya menjadi prioritas pemerintah baru dan semua calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada. Kota layak huni wajib menjadi standar karena kita semua ingin menjaga kesehatan warga.

Tidak ada artinya menjadi Jakarta Baru jika kotanya tidak layak huni. Tidak ada artinya menjadi Jakarta Maju jika kotanya tidak layak huni. Calon gubernur Ridwan Kamil dan Pramono Anung memiliki kesempatan

bersejarah untuk membalik keadaan jika mereka berkomitmen untuk membalik keadaan.

Menurut data Indek Kota Layak Huni Global Livability Index 2023 yang diterbitkan oleh the Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta berada di peringkat 139 dari 173 kota di dunia. Selama 10 tahun terakhir, 2015-2023, peringkat Jakarta itu konsisten. Jakarta masih menghadapi tantangan berat seperti polusi udara, infrastruktur transportasi, dan kualitas lingkungan yang mempengaruhi penilaian layak huninya.

Pada intinya adalah tiga hal. *Pertama*, bagaimana kualitas air bersih bisa diperbaiki menjadi air minum. *Kedua*, bagaimana polusi udara bisa dikendalikan dan dikurangi. *Ketiga*, bagaimana hutan-hutan kota dan taman-taman bisa diperluas dengan jutaan pohon hijau.

Masalah utamanya adalah salah arah kebijakan publik dan strategi politik. Jika proyek air minum di Jakarta dan Surabaya ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) selama lima tahun terakhir, dan jika ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, air minum kini dapat diakses oleh 5-10 persen penduduk. Memprioritaskan modernisasi perusahaan air minum di Jakarta dan Surabaya sebagai PSN, bersama dengan investasi yang diperlukan, akan memperluas jaringan pipa dan meningkatkan kualitas air.

Selama lima tahun terakhir, jika peningkatan kualitas air minum telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, dengan upaya terkoordinasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga waduk dan sungai yang memasok air bersih ke Jakarta, PAM akan memiliki bahan baku yang cukup. Lebih jauh, jika modernisasi air bersih menjadi air minum untuk 10 hingga 20 kota di Indonesia telah diprioritaskan sebagai inisiatif strategis

## RINGKASAN

Pada intinya adalah tiga hal. *Pertama*, bagaimana kualitas air bersih bisa diperbaiki menjadi air minum. *Kedua*, bagaimana polusi udara bisa dikendalikan dan dikurangi. *Ketiga*, bagaimana hutan-hutan kota dan taman-taman bisa diperluas dengan jutaan pohon hijau.

.....

Jika saja selama 5 tahun Perbaikan Air Minum menjadi PSN (proyek Strategis Nasional dan aksi serentak oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengamankan waduk dan sungai sungai yang memasok bahan baku air bersih di Jakarta, maka PAM akan memiliki bahan baku yang cukup.

.....

Kota Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2000-an sudah menyediakan air minum. Semuanya dimulai sejak tahun 1989 ketika Seoul memulai modernisasi besar-besaran sistem penyediaan air minum. Program modernisasi sistem pengolahan dan distribusi air minum, dengan fokus utama pada perbaikan fasilitas pengolahan air,

nasional selama dekade terakhir, kondisi kehidupan penduduk di kota-kota tersebut akan meningkat secara signifikan.

Ruang publik dan tempat kerja, seperti pasar, masjid, gereja, bandara, terminal, stasiun, sekolah, dan kantor pemerintah, akan mendapatkan manfaat dari penghematan biaya yang substansial atau tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk mengakses air minum. Skenario ini akan mengarah pada efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, bahkan saat Indonesia terus melanjutkan perjalanannya menuju negara maju. Masyarakat kelas menengah dan

warga pada umumnya akan merasakan peningkatan kemudahan dan aksesibilitas.

Kota-kota satelit seperti Bumi Serpong Damai, Cibubur, Bintaro, dan Pondok Indah, yang dianggap sebagai kawasan permukiman kelas atas dengan perencanaan kota yang baik, tidak memasukkan ketersediaan air minum perpipaan ke dalam skema pembangunan mereka. Akibatnya, penduduk terus bergantung pada ekstraksi air tanah atau membeli air minum kemasan. Ada apa dengan Indonesia?

Biaya IKN	Biaya Penyediaan Air Minum di 10-30 Kota Indonesia
Rp. 72 Triliun Dana APBN untuk IKN selama 3 tahun terakhir	<p><b>Jakarta</b> 120 kali biaya pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PAM Jakarta di Pesanggaran Jaksel. @Rp. 200 Miliar. Rp. 4-8 Triliun dari Rp. 72 Triliun bisa membangun 10 IPA dan modernisasi perpipaaan dan pengadaan teknologi untuk produksi dan pengolahan Air Minum PAM di seluruh wilayah Jakarta.</p>
	<p><b>Semarang</b> 72 kali biaya Pembangunan fasilitas pengolahan Air Minum/SPAM Semarang Barat @Rp 870 miliar. 12 kalinya APBD Kota Semarang @5-6 Triliun.</p>
	<p><b>Surabaya dan Jatim</b> 18 kali biaya Proyek air bersih Umbulan Jatim untuk memproduksi dan memasok bahan baku air di PAM Surabaya dan Sekitarnya senilai @Rp.4 Triliun</p>
	<p><b>Bandar Lampung</b> 51 kali biaya Sistem Pengolahan Air Minum -SPAM Kota Bandar Lampung senilai @ Rp 1,38 triliun</p>
	<p>20-30 Kota di seluruh Indonesia Medan, Pontianak, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Makasar, Baikpapan, Pontianak, Tangerang, Bekasi, Gresik, dll akan memiliki sistem pengolahan Air Minum atau modernisasi alat dan teknologi Air minum. @Rp.3-4 Trilliun.</p>

Seandainya ada air layak minum, warga tak usah galau dengan air galon dengan Bisfenol A (BPA). Itu kegagalan pelayanan publik yang harus ditanggung dan dibayar masyarakat semua golongan. Meski publik tereduksi dan jadi melek toksik BPA, isu kualitas air isi ulang dan BPA dalam galon plastik polikarbon menjadi risiko kesehatan masyarakat yang lebih parah ketimbang klorin. BPA adalah salah satu endocrine disruptor chemicals, dapat menyebabkan kanker dan penyakit gangguan hormonal.

Dana jumbo APBN untuk IKN selama tiga tahun terakhir berjumlah Rp 72-73 triliun. Jika dana ini dialokasikan untuk investasi dan modernisasi PAM di Jakarta dan 20 kota di Indonesia, dalam waktu singkat, tiga tahun, kota-kota Indonesia sudah dilengkapi dengan air minum, bukan air bersih. Indonesia sudah melompat tinggi.

Mengapa hal itu tidak terjadi? Mungkin ada pandangan bahwa membangun sistem air minum di 10-30 perkotaan Indonesia hanyalah rutin. Tidak menaikkan citra karena bukan membangun proyek monumental. Tidak

**Kota kota Satelit seperti BSD. Cibubur, Bintaro dan Pondok Indah yang dianggap perumahan papan atas dengan tata kota yang benar pun tidak memasukkan ketersediaan dan penyediaan Air Minum perpipaan dalam skemanya. Sehingga warga dan penduduknya masih saja menyedot air tanah atau membeli air Galon. Ada apa dengan Indonesia?**

memberikan popularitas tinggi dan panen politik ketimbang Dana Tunai atau Bansos kepada rakyat.

Ada banyak alasan untuk pesimistis tentang kota-kota Indonesia. Mereka pesimistis apakah kota-kota akan bisa layak huni. Udaranya terpolusi sehingga anak-anak dan orang tua warga Jakarta dan sekitarnya sering terserang batuk dan penyakit pernapasan. Air Minum tidak tersedia karena yang ada adalah Air Bersih. Untuk mendapatkan air minum kita harus membeli air galon.

Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Jakarta baru sekitar 5 persen, belum berhasil melompat menjadi 10 atau menjadi 20 persen.

Pembangkit listrik di sekitar Jakarta berbahan bakar batubara yang terus-menerus membuang limbah udara terpolusi tanpa ada rencana kapan akan dipindahkan atau diganti dengan sumber gas yang lebih bersih hijau.

Di Jakarta meski saluran perpipaan PDAM Jakarta terus bertambah meluas dalam 10 tahun terakhir, kualitas airnya masih Air Bersih bukan Air Minum. PDAM seharusnya singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum tapi sudah berpuluh tahun hanya Air Bersih.

Air minum dilepas dari tanggung jawab dan kewajiban negara. Negara tidak hadir dengan nyata bagi penyediaan air minum untuk warga kota. Negara yang diamanatkan oleh UUD 45 tidak hadir dan aktif memastikan kemudahan hidup semua warga dan golongan sosial.

Kota Manila, Filipina, yang dulu pernah luluh lantak akibat Perang Dunia II, PDAMnya terbukti sudah mampu menyalurkan Air Minum bukan air bersih, meski cakupannya dan distribusinya belum 100 persen.

TAHUN	JAKARTA	BANGKOK	MANILA	KUALA LUMPUR	SEOUL
2015	126	100	108	74	58
2016	115	98	104	70	57
2019	120	98	109	85	58
2020	94	73	106	79	50
2021	138	99	109	70	53
2022	117	103	105	70	60
2023	134	105	136	73	59

### PERINGKAT INDONESIA DALAM GLOBAL LIVEABILITY INDEX- 2015-2023 Via THE ECONOMIST

Kota Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2000-an sudah menyediakan air minum. Semuanya dimulai sejak tahun 1989 ketika Seoul memulai modernisasi besar-besaran sistem penyediaan air minum. Program modernisasi sistem pengolahan dan distribusi air minum, dengan fokus utama pada perbaikan fasilitas pengolahan air, pembaruan jaringan pipa, dan pengembangan teknologi pemantauan kualitas air.

Pada tahun 2000, sistem air minum

Seoul diubah namanya menjadi “Arisu”, yang berarti “air yang jernih” dalam bahasa Korea kuno. Nama ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas air keran di Seoul. Pada tahun 2007, Seoul mulai memasang sistem pemantauan otomatis di berbagai fasilitas pengolahan air dan jaringan distribusi. Ini memungkinkan pemantauan kualitas air secara real-time dan deteksi dini terhadap potensi

masalah kontaminasi. Pada tahun 2012 Seoul berhasil mewujudkan air keran di penjuru kota yang secara resmi dinyatakan layak untuk diminum langsung tanpa perlu dimasak atau disaring.

Polusi udara bisa diatasi asal ada kemauan politik. Kota Beijing bisa menjadi contoh mengatasi polusi udara. Bagaimana komitmen dan tindakan tegas mampu mengatasi

polusi udara 5-10 tahun lalu. Beijing juga mewajibkan pembangkit listrik mengganti sumber energi dengan sumber-sumber energi seperti gas atau energi hijau dan atau memindahkan pembangkit listrik itu ke lokasi lain jauh dari Beijing. Selama tiga tahun, 50 juta pohon juga ditanam di Beijing. Sementara itu, 180 taman perkotaan baru dan 230 lebih taman-taman kecil dibangun di seluruh pojok Beijing.

## REFERENSI

- Komarulzaman, A., Smits, J. and de Jong, E., 2017. Clean water, sanitation and diarrhoea in Indonesia: Effects of household and community factors. *Global public health*, 12(9), pp.1141-1155.
- Irianti, S., Prasetyoputra, P. and Sasimartoyo, T.P., 2016. Determinants of household drinking-water source in Indonesia: An analysis of the 2007 Indonesian family life survey. *Cogent Medicine*, 3(1), p.1151143.
- Semba, R.D., de Pee, S., Kraemer, K., Sun, K., Thorne-Lyman, A., Moench-Pfanner, R., Sari, M., Akhter, N. and Bloem, M.W., 2009. Purchase of drinking water is associated with increased child morbidity and mortality among urban slum-dwelling families in Indonesia. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 212(4), pp.387-397.
- Sima, L.C., Desai, M.M., McCarty, K.M. and Elimelech, M., 2012. Relationship between use of water from community-scale water treatment refill kiosks and childhood diarrhea in Jakarta. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 87(6), p.979.
- Regmi, R.K. and Mishra, B.K., 2016. Use of water quality index in water quality assessment: A case study in the Metro Manila.
- David, C.C. and Inocencio, A.B., 1998. Understanding household demand for water: the Metro Manila case. *EEPSEA research report series/IDRC. Regional Office for Southeast and East Asia, Economy and Environment Program for Southeast Asia*.
- Palanca-Tan, R., 2017. Health and water quality benefits of alternative sewerage systems in Metro Manila, Philippines. *Environment and Urbanization*, 29(2), pp.567-580.
- Kim, H., Son, J., Lee, S., Koop, S., Van Leeuwen, K., Choi, Y.J. and Park, J., 2018. Assessing urban water management sustainability of a megacity: Case study of Seoul, South Korea. *Water*, 10(6), p.682.
- Ahn, J.C., Kim, Y.W., Lee, K.S. and Koo, J.Y., 2004. Residual chlorine management in water distribution systems using network modelling techniques: case study in Seoul City. *Water Science and Technology: Water Supply*, 4(5-6), pp.421-429.
- Min, S.Y. and Kim, S.I., 2018. Study on Improvement of tap water drinking rate of Seoul city Tap water 'Arisu' through usage and recognition analysis. *Journal of Digital Convergence*, 16(9), pp.399-404.



RUMAH POLITIK  
KESEJAHTERAAN